



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 838/X/2014

IV/OKTOBER 2014



Bahu Membahu Untuk Indonesia Gemilang

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

Kesinambungan Pembangunan Ada di Tangan Presiden dan Wakil Presiden

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyatakan kesinambungan pembangunan saat ini ada di tangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini ia ungkapkan saat memimpin Sidang Paripurna dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung Nusantara, Senin (20/10).

“Tantangan dan peluang membentang di hadapan kita bersama. Semoga, Presiden dan Wakil Presiden senantiasa sukses dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, sukses memimpin bangsa dan negara, menjadikan Indonesia negara yang berdaulat, bermartabat dan berperan serta dalam membangun peradaban bangsa,” harap Zulkifli.

Politisi PAN ini menambahkan, saat ini Indonesia berada dalam lingkungan strategis yang menguntungkan. Indonesia memiliki keuntungan yakni bonus demografi, bergesernya pusat ekonomi dunia ke Asia, besarnya kelas menengah yang mencapai 56,7% dari penduduk, serta terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN ke depan.

“Mari kita ciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan impian besar bangsa Indonesia. Kita wujudkan sistem politik yang demokratis, sistem hukum yang adil, sistem ekonomi yang adil dan produktif, serta sistem sosial budaya yang beradab, untuk menghadapi tantangan sekaligus peluang mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera,” papar Zulkifli.

Mantan Menteri Kehutanan periode Presiden SBY ini memaparkan, keberhasilan Indonesia dalam bidang ekonomi menempatkan Indonesia dalam peran strategis baik regional maupun global, perlu diperkuat dengan kemandirian bangsa. Mengingat, kemandirian bangsa menjadi penting



Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla didampingi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan usai pelantikan

dan relevan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta dampak negatif globalisasi.

“Kita harus berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, demikian tiga konsep TRISAKTI warisan Bung Karno. Karakter bangsa juga harus terus kita perkokoh, tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuh Zulkifli.

Zulkifli mengingatkan, pekerjaan bangsa Indonesia ke depan adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu, ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya.

“Dengan bergotong royong, pekerjaan besar akan menjadi ringan. Kita satu saudara, harus bahu membahu, bergandengan tangan meraih masa depan Indonesia yang gemilang,” ajak Zulkifli. (sf)/foto: eka hindra/parle/hr.

Surahman : Menjadi Anggota MKD Suatu Kehormatan

Anggota Fraksi PKS Surahman Hidayat mengatakan penunjukan dirinya sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan - MKD DPR RI sebagai sebuah kehormatan. Baginya tugas dan fungsi MKD, menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sangat strategis.

“Bagi saya ini penugasan dari partai dan fraksi yang harus saya jalani. Mahkamah ini tentu sangat strategis bagi dewan, namanya saja mahkamah. Suatu kehormatan menjadi bagian dari alat kelengkapan dewan ini,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/14).

Mantan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR ini mengaku masih perlu waktu untuk mempelajari sejumlah ketentuan karena MKD tidak sepenuhnya sama Badan Kehormatan. Ia berharap pada periode ini masalah etik menjadi perhatian setiap anggota dewan sehingga muncul perbaikan.

“Ada sejumlah penyesuaian yang harus saya pelajari di MD3, Tata Tertib dan juga Kode Etik. Iya kita harapkan dalam periode ini masalah etik anggota dewan akan lebih baik,” tuturnya.

UU MD3 menyebut anggota Mahkamah Kehormatan



Surahman Hidayat Mantan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen – BKSAP DPR RI

Dewan berjumlah tujuh belas orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Sejauh ini sepuluh nama telah diserahkan lima fraksi yaitu Lili Asdjudiredja, Hardisoesilo, John Kenedy Azis dari FPG. Darizal Basir dan Guntur Sasono dari FPD serta FPAN Hang Ali Saputra Syah Pahan dan Riski Sadig.

PKS hanya menempatkan satu orang anggota. Lima fraksi lainnya yaitu FPDIP, FPKB, FPHanura, FPPP dan FP-Nasdem belum menyerahkan daftar nama anggotanya. (iky) foto: iwan armanias/parle/iw.

Paripurna Sahkan Keanggotaan AKD Lima Fraksi

Sidang Paripurna DPR mengesahkan nama-nama anggota dari lima fraksi untuk Komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD). Kelima fraksi itu yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKS. Sedangkan, lima fraksi lain belum menyerahkan nama-namanya, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem dan Fraksi PPP.

Sebelum nama-nama anggota itu disahkan, sempat terjadi perdebatan sesama Anggota DPR, bahkan terjadi interupsi bertubi-tubi. Ada Anggota DPR yang meminta pengesahan ditunda, dan menunggu fraksi yang belum menyerahkan nama-nama anggota. Sementara, ada juga yang meminta langsung disahkan saja nama-nama



Yoseph Umarhadi Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI

anggota yang sudah diterima Sekretariat Jenderal DPR. Termasuk permintaan agar rapat di-skorsing, sehingga fraksi-fraksi dapat melakukan lobi-lobi.

Anggota DPR Yoseph Umar Hadi mengatakan skorsing sidang bisa saja ditempuh agar fraksi-fraksi yang belum menyerahkan nama anggota bisa melakukan lobi-lobi. “Kita bisa menyerahkan pada fraksi-fraksi yang belum menyebutkan nama-nama tersebut. Skors sebentar untuk melakukan lobi dan musyawarah mufakat,” kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Akhirnya, karena hujan interupsi terus terjadi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akhirnya memberikan solusi dengan meminta rapat diskors 30 me-

nit. Namun Fahri menggaris bawahi, jika penetapan Anggota Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan harus tuntas hari ini, mengingat cukup banyak pekerjaan yang menunggu.

Usai skors dicabut, rapat pun dilanjutkan kembali dan langsung menuju

ke pengesahan nama-nama anggota Komisi dan AKD dari lima fraksi. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, selaku pimpinan sidang pun mengetok palu disetujuinya nama-nama anggota dari lima fraksi yang ditugaskan pada Komisi I hingga Komisi XI dan alat kelengkapan dewan.

“Apakah nama-nama yang sudah ditetapkan dan diajukan ke Kesekjenan dapat disetujui,” kata Taufik di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Selasa (21/10/14). Jawaban “Setuju” pun diserukan oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir. (sf)/foto: andri/parle/iv.

DPR Harapkan Kerjasama Bilateral Korsel-Indonesia Meningkatkan



Pimpinan DPR menerima Duta Besar Republik Korea Selatan HE. Mr. Taiyoung

Ketua DPR Setya Novanto mengharapkan kerjasama Bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia semakin meningkat dimasa datang.

“Sebagaimana kita ketahui hubungan kedua negara dimulai sejak tahun 1966 dengan dibukanya kedutaan besar RI di Seoul serta penandatanganan deklarasi bersama kemitraan antar kedua negara pada tahun 2006,” ujarnya saat menerima Rombongan Duta Besar Republik Korea Selatan HE. Mr Taiyoung di ruang Pimpinan, Nusantara III, Rabu, (22/10).

Sejak penandatanganan tersebut, lanjut Setya, Hubungan perekonomian

antara Indonesia dan Korea semakin meningkat bahkan realisasi ekonomi melampaui Jepang dan AS

Hingga 2012, realisasi kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan mencapai US\$26,9 miliar. Nilai ekspor produk Indonesia ke Korea Selatan adalah \$15 miliar, sementara nilai ekspor Korea Selatan ke Indonesia adalah \$11,9 miliar.

Sementara itu, realisasi kerjasama perdagangan kedua negara pada periode Januari hingga Juni 2013 adalah sebesar \$11,9 miliar. Angka tersebut deficit bagi Indonesia karena ekspor produk Indonesia ke Korea Selatan

sebesar \$5,8 miliar sementara dan impor dari Korea Selatan adalah \$6,1 miliar.

“Hubungan ekonomi Indonesia-Korea Selatan menempati posisi empat terbesar bagi Indonesia dibandingkan Jepang atau AS,” ujarnya.

Dia menambahkan, dirinya yakin pasca Terpilihnya Presiden RI Joko Widodo hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan semakin kuat begitu juga hubungan Parlemen antar kedua negara. “Sangat menarik melihat perkembangan investasi korea di Indonesia,” terangnya.

Pada kesempatan itu. Setya meminta Korea Selatan juga turun serta meningkatkan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea melalui hubungan people contact antar kawasan di Korea.

“DPR meminta Korea Selatan semakin meningkat kontribusinya khususnya terkait persoalan Politik dan Keamanan melalui berbagai forum dikawasan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan, Duta Besar Korea Selatan HE. Mr Taiyoung. Dirinya mengharapkan pasca pelantikan Presiden RI Joko Widodo hubungan Korea Selatan dan Indonesia semakin meningkat. “Kita telah mengutus dua orang anggota Parlemen untuk menghadap dan mengucapkan selamat atas pelantikan tersebut,” terangnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Korea Selatan sangat serius ingin membina kerjasama di berbagai bidang dengan Pemerintah Indonesia. (si)/foto:andri/parle/hr.

RUU KUHP dan KUHPA Harus Jadi Prioritas

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Martin Hutabarat kembali mendapatkan tugas sebagai anggota Komisi III. Salah satu misi penting yang ingin dituntaskannya pada periode lima tahun ke depan adalah menyelesaikan pembahasan RUU KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Ini kehormatan bagi saya bisa melaksanakan tugas kembali di Komisi III. Satu yang jadi perhatian saya adalah RUU KUHPA dan KUHP, ini harus bisa kita selesaikan pada periode ini,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/10/14).

Martin yang pada periode sebelumnya juga bertugas di Komisi Hukum ini berharap seluruh fraksi mempunyai komitmen yang sama untuk menyelesaikan produk legislasi yang ditunggu-tunggu publik ini. Ia juga menyebut

sejumlah RUU lain yang perlu diselesaikan pembahasannya yaitu RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan dan RUU Mahkamah Agung.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan anggota Komisi III dari lima fraksi telah ditetapkan secara resmi. Lima fraksi lainnya yaitu FPDIP, FPKB, FP Nasdem, FP Hanura dan FPPP masih meminta waktu.

Anggota Komisi III dari FPG sembilan anggota yaitu Azis Syamsuddin, Bambang Soesatyo, John Kenedy Azis, Yayat Yulmaryatmo Biaro, Agus Gumiwang Kartasasmita, Adies Kadir, Zainudin Amali, Andika Hazrumy dan Wenny Haryanto.

FP Gerindra tujuh anggota, Sufmi Dasco Ahmad, Desmond Junaidi Mahesa, Sareh Wiyono, Wihadi Wiyanto, Iwan Kurniawan, Wenny Warouw dan



Martin Hutabarat Anggota F-Gerindra DPR RI

Martin Hutabarat. FP Demokrat enam anggota yaitu Didik Mukrianto, Benny Kabur Harman, Ruhut Poltak Sitompul, Erma Suryani Ranik, Liberth Kristo Ibo dan Sutan Sukarnotono.

FPAN empat anggota Mulfachri Harahap, Muslim Ayub, Daeng Muhammad dan Tjatur Sapto Edy. Selanjutnya FPKS juga empat anggota Aboe Bakar Al-Habsyi, TB. Soenmandjaja, Al Muzammil Yusuf dan Muhammad Nasir Djamil. (iky) foto: iwan armanias/parle/hr.

Krishna Mukti Ingin Komisi X, Luki Hakim Pilih Komisi V

Anggota DPR Krishna Mukti mengatakan dirinya ingin menjadi anggota Komisi X. “Karena saya orang seni maka akan cocok duduk di Komisi X. Karena jika saya ditempatkan di Komisi lain saya harus banyak belajar lagi mungkin sepuluh kali lipat. Yang penting di bidangnya agar saya bisa lebih konsentrasi,” ujarnya saat ditemui setelah pelantikan presiden terpilih Joko Widodo di Komplek Parlemen DPR Jakarta, Senin (20/10).

Menurut politisi dari PKB ini, penempatan anggota fraksi di komisi harus sesuai dengan bidangnya agar bisa lebih berkonsentrasi dan fokus terhadap keahliannya. Ia menyatakan, pimpinan fraksinya tidak akan menempatkan seseorang yang tidak sesuai dengan bidangnya.

“Ketua umum Partai pun akan mempertimbangkan semuanya dengan baik



Krisna Mukti Anggota F-PKB DPR RI

dan tidak asal-asalan menempatkan anggota dewannya di tempat komisi yang bukan bidangnya,” katanya.

Aktor ini mengatakan bahwa dirinya saat ini sudah memiliki rencana program untuk satu tahun ke depan. Namun karena pembentukan komisi belum selesai maka program tersebut belum dapat terealisasi. Meski

demikian, saat ini dirinya sedang berusaha membuat forum dialog dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini dilakukannya agar masyarakat di daerah pemilihannya dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Saya sudah punya *planning* untuk satu tahun ke depan. Pertama saya lakukan sekarang adalah menghubungi seluruh jajaran PemKab dan Pemkot dari daerah konstituennya dan ingin kumpulan mereka dari RT, RW, Lurah, Camat, Walikota dan Bupati. Kita buat semacam dialog dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka,” tegas dia.

Sementara itu, anggota DPR yang juga aktor Luki Hakim mengatakan dirinya memilih masuk Komisi V (bidang infrastruktur). Aktor berparas tampan beralasan, karena kondisi infrastruktur di daerah pemilihannya

yaitu Bekasi dan Depok harus segera dibenahi.

“Maunya saya di Komisi V, karena dapil saya kan Bekasi dan Depok,

masih banyak infrastruktur yang harus di benahi. Juga banjir, kemacetan dan daerah pemukiman yang padat membuat saya ingin menjadi anggota Komisi V agar bisa cepat membenahi

dapil saya,” kata politisi dari Fraksi PAN ini menambahkan. (mp, maf, yd)
foto:naefuroji/parle/iw

Kekerasan Anak Jangan Terjadi Lagi



Ade Rezki Pratama Anggota F-Gerindra DPR RI

Video berjudul “Kekerasan Siswa SD” yang diunggah ke Youtube belum lama ini cukup meyakinkan perhatian masyarakat luas. Betapa tidak, video ini memperlihatkan pengkeroyokan yang dialami DAN (12), siswi SD Trisula Perwari Bukittinggi, Sumatera Barat yang diduga dilakukan beberapa temannya di dalam kelas.

Hal ini pun mendapat perhatian dari Anggota DPR Ade Rezki Pratama. Pasalnya, kejadian ini terjadi pada anak di tingkat Sekolah Dasar dan di kampung halamannya, Sumatera Barat. Ia sangat menyayangkan hal yang tidak diinginkan ini terjadi.

“Kejadian kekerasan di salah satu sekolah dasar di Bukittinggi ini sangat menyedihkan sekali. Ini sebuah tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia. Mungkin ada sebuah kelalaian dari sekolah, Dinas Pendidikan setempat, termasuk orang tua. Kita tidak dapat menyalahkan satu pihak

saja, tetapi ini adalah kesalahan kita bersama,” sesal Ade, saat ditemui usai Sidang Paripurna Pelantikan Presiden, di Gedung Nusantara, Senin (20/10/14).

Politisi Gerindra ini menduga, hal ini terjadi akibat adanya keteledoran dari guru-guru disekolah dalam mengawasi murid-muridnya. Namun di satu sisi, tidak bisa hanya guru yang disalahkan. Harus ada peran dari berbagai pihak untuk melakukan tindakan preventif.

“Ini tanggung jawab kita bersama dengan melakukan tindakan preventif. Saya menduga, ini juga dampak dari tayangan-tayangan, baik di televisi maupun media internet, yang saat ini sangat mudah diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Saya berharap ke depan Pemerintah dapat melakukan filterisasi berbagai tayangan,” harap Ade.

Ia juga mendesak Pemerintah untuk memiliki regulasi dalam menjaga dan menyelematkan generasi muda. Salah satu yang bisa dilakukan, Pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan penyaringan berbagai tayangan di seluruh media, baik televisi, internet maupun media cetak.

“Mudah-mudahan ini terjadi untuk pertama dan terakhir kalinya terjadi di Bukittinggi ataupun di seluruh Indonesia. Jangan terulang lagi. Ini pukulan telak bagi kita sebagai orang tua yang memiliki tugas membawa generasi muda kita lebih baik ke depannya. Apalagi murid Sekolah Dasar merupakan

langkah dasar dalam menemukan dan menciptakan generasi muda yang memiliki sikap baik dan intelektual yang tinggi,” harap Anggota DPR termuda periode 2014-2019 ini.

Hal serupa juga pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, beberapa waktu yang lalu. Ia sangat menyayangkan kekerasan ini terjadi pada anak di bawah umur. Tapi, walaupun belum pelakunya diduga masih di bawah umur juga, namun harus tetap mengikuti proses hukum yang berlaku.

“Walaupun anak ini di bawah umur, namun harus tetap ada tidak lanjutnya atau jangan ditinggalkan saja, namun harus tetap memperhatikan tata aturan yang berlaku buat anak-anak. Dinas harus melakukan tindakan secara langsung, bahkan harus mencari penyebabnya, sehingga tidak terjadi lagi,” sesal Mantan Ketua Komisi X ini.

Politisi Demokrat ini menambahkan, seluruh pihak harus bertanggung jawab, mulai dari sekolah, Dinas Pendidikan Kecamatan hingga Kabupaten/Kota. Pasalnya, instansi-instansi tersebut yang berhubungan langsung di lapangan.

“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Sekolah maupun Dinas Pendidikan harus bertanggung. Sedangkan, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan arahan dan warning. Ini suatu pelanggaran, jangan sampai terjadi lagi,” harap Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini. (sf) foto: naefuroji/parle/iw

Itet Nilai Joko Widodo Menjadi Satria Piningit

Anggota DPR RI Itet Tridjajati Sumarjanti merasa terharu dan bangga setelah mendengar Pidato Presiden Joko Widodo. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan), ini merasakan perjalanan

hidup dari zaman Bung Karno sampai sekarang di jaman Jokowi. Ada harapan yang bisa didapatkan dari sosok Jokowi yang sederhana.

“Saya anggap Dia (Joko Widodo)

menjadi Satria piningit. Satria piningit itu sosok yang muncul dari tempat yang tidak dikenal, dari nama yang tidak dikenal, tapi dalam waktu yang singkat namanya meroket. Nah itu ciri-ciri satria piningit,” kata Itet, demikian



dia biasa disapa, usai mengikuti Pelantikan Presiden Joko Widodo, Senin (20/10), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan) ini merasa haru dan bangga dan setelah Bung Karno, dia baru menemukan suatu pemimpin yang betul-betul merakyat. Menurutnya, Joko Widodo cukup meyakinkan rakyat bahwa dia bisa mengatasi negeri ini dengan gayanya yang menyapa rakyat langsung dan sangat unik.

“Setelah dilantik, Joko Widodo menyalami semua anggota DPR. Itu suatu tanda bahwa dia konsisten. Ini yang kita tunggu-tunggu selama ini. Itu harapannya supaya tetap konsisten, tetap menyapa rakyat, tetap kerja keras,” jelasnya dengan haru.

Itet juga menyampaikan apresiasi atas pidato Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Presiden Jokowi mengajak kita untuk kembali menjunjung tinggi Trisakti (Berdaulat, Berdikari, dan Berkepribadian Indonesia), yang paling ditekankan bahwa menyebut berkali-kali kerja keras dan gotong royong. Serta tidak lupa menyebut petani, asongan dan tukang bakso. Itulah realita yang kita alami di negeri ini.

“Penting bagi kita semua bahwa

presiden sudah mengajak kita bersama-sama. Jadi saya sebagai anggota DPR juga harus bekerja keras jangan duduk-duduk saja. Itukan hal yang penting karena dia diresmikan di depan DPR dan DPD, dan rakyat yang menyaksikan di media massa,” tambahnya.

Kemudian ajakan kembali ke jati diri bangsa yang selama ini mungkin tidak digaungkan, sehingga masyarakat lupa bahwa kita akan berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian poin lain yang disampaikan Jokowi adalah berkepribadian dalam kebudayaan. “Budaya kita bukanlah *fried chicken* dan sebagainya namun bakso dan makanan lain yang sekarang menjadi kuliner asli Indonesia. Justru itulah bagaimana dengan bekerja keras kita bisa mengemas menjadi lebih baik sehingga kita juga memiliki standar internasional,” tegasnya.

Tantangan besar Pemerintahan Joko Widodo ke depan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kesehatan, karena selama ini kita tidak melihat terobosan untuk pendidikan dan kesehatan, baru terakhir ada Undang Undang Pendidikan Kedokteran. “Sudah lama kita tidak punya dokter di pelosok-pelosok. Dengan Jokowi menyebut fundamental, fondasi untuk membangun negara ini harus dipriori-



Itet Tridjajati Sumarijanti Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI

taskan,” paparnya.

Tantangan besar lain, kata Itet, lebih dari 50% anak sekolah tidak melanjutkan SD, lalu kemudian hanya satu koma sekian persen yang melanjutkan ke universitas. Ia yakin, Presiden Jokowi dengan kerja kerasnya Indonesia bisa memetakan kembali pondasi-pondasi untuk melanjutkan pembangunan negeri ini.

“Mari kita sama-sama ucapkan selamat kepada Jokowi-JK dan selamat juga kepada rakyat Indonesia, mudah-mudahan ke depan kita hidup bergotong royong dan bekerja keras,” tegas anggota Parlemen dari Dapil Lampung II. (as/ld)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Pemilihan Pimpinan AKD Diharapkan Dengan Musyawarah Mufakat

Anggota DPR Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat dan Arif Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan berharap, pemilihan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan Dewan (AKD) dilakukan dengan musyawarah mufakat. Hal itu dikatakannya sebelum mengikuti Sidang Paripurna Selasa (21/10) siang di Gedung DPR sehubungan penetapan dan pengesahan anggota Dewan AKD.

Rapat Paripurna DPR Selasa (21/10) siang dipimpin Wakil Ketua Taufik Kurniawan beragendakan pengesahan nama-nama anggota fraksi dalam alat-alat kelengkapan DPR. Setelah selesai pengesahan komposisi keanggotaan pada AKD, mestinya dilanjutkan de-



Arif Wibowo Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI

ngan pemilihan Pimpinan AKD yang dilakukan secara terpisah dipimpin Wakil-wakil Ketua DPR.

Namun rapat paripurna kali ini ternyata diwarnai banyak interupsi sehingga agenda utama penetapan keanggotaan Dewan sempat diskors. Pasalnya dari 10 fraksi yang ada belum seluruhnya menyerahkan daftar nama-namanya sehingga dilakukan lobi. Sebagian anggota mengharapkan pengesahan komposisi keanggotaan Dewan di AKD ini segera disahkan sebab tugas-tugas konstitusional telah menunggu.

Baik Ruhut maupun Arif Wibowo sependapat kita harus musyawarah mufakat, jangan apa-apa voting. “Kita mohon dalam pemilihan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan Dewan (AKD)

utamakan musyawarah mufakat. Jangan apa-apa voting, peniing aku,” kata Ruhut dengan gaya kocaknya.

Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo

menambahkan, terkait pemilihan Pimpinan AKD sampai kini masih terus dibicarakan. Saat ditanyakan apakah sistem paket juga akan jalan, “Sampai kini masih dibicarakan,” untkannya

dengan mengharapkan, pihaknya akan mendorong dilakukan musyawarah mufakat. (mp)/foto: iwan armanias/parle/hr.



Anna Mu'awanah Anggota F-PKB DPR RI

Gaya komunikasi Presiden Joko Widodo sangat positif. Komunikasi politiknya sangat merakyat dan mudah dicerna semua kalangan. Ini menjadi keunggulan Jokowi kelak dalam mengomunikasikan program-program

Komunikasi Jokowi Mudah Dicerna

kerjanya kepada masyarakat.

Anggota F-PKB DPR RI Anna Mu'awanah menegaskan penilaian tersebut sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/10). “Jokowi seorang praktisi yang berpikir secara praktis, efektif, dan bisa ditangkap oleh masyarakat. Komunikasi politiknya mudah dicerna oleh seluruh rakyat,” nilai Anna.

Penilaian Anna itu terkait dengan isi pidato perdana Jokowi saat pelantikan dirinya sebagai Presiden RI. Menurut Anna, pidato Jokowi realistis dan lang-

sung pada *straight point*. Dia mengajak semua kalangan, baik petani, akademisi, pedagang, dan nelayan untuk bersatu membangun bangsa.

Sementara mengomentari gagasan membangun negara maritim, mantan Wakil Ketua Baleg DPR itu, sangat mengapresiasi. Konsep pembangunan potensi laut sudah pernah digagas semasa Gus Dur menjadi presiden. Di laut banyak potensi kekayaan Indonesia berupa migas, pariwisata, hingga transportasi laut. Apalagi, lanjut Anna, luas wilayah Indonesia didominasi oleh 2/3 lautan. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Kalangan DPR Berharap Pemerintahan Jokowi Sukses Jalankan Amanah

Pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla telah berlangsung pada Senin, 20 Oktober 2014. Banyak yang berharap pemerintahan baru Jokowi JK akan memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia, sesuai dengan ide revolusi mental yang didegunkan dan jargon Indonesia Hebat yang menghiasi sepanjang pemilihan umum lalu. Seberapa besar harapan Anda pada pemerintahan yang baru?

Anggota DPR RI Totok Daryanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menyampaikan harapan besar kepada Presiden Joko Widodo, yang menginginkan kesuksesan dalam pembangunan.

“Kita semua ingin sukses, termasuk kita di DPR ini apakah Kualisi Merah Putih (KMP) atau Kualisi Indonesia Hebat (KIH) sama-sama berharap pemerintah sukses. “Jika Presiden sukses rakyat Indonesia yang akan menikmati,” kata politisi dari Dapil Jawa Timur V.

Namun menurut Totok, mungkin dalam peran yang berbeda KMP dalam perjalanannya akan lebih megkritisi pemerintah sehingga akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.

Anggota dari Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih, menilai program-program yang akan dijalankan cukup menjanjikan, namun perlu komunikasi yang dijalin dengan baik, sehingga kesinambungan dan perencanaan program bisa terlaksana dengan baik.

“Percepatan yang dicita-citakan kita seperti kesejahteraan masyarakat bisa dilaksanakan dan kita percepat pencapaiannya,” kata Linggih asal Dapil Bali.

Achmad Basarah (F-PDI Perjuangan) meminta Presiden Joko Widodo harus kerja lebih keras, lebih banyak lagi, lebih cerdas, lebih sabar, dan menjadi Presiden yang luar biasa menghadapi situasi yang luar biasa ini.



Totok Daryanto Anggota F-PAN DPR RI

Oleh karena itu, Presiden harus segera melakukan kordinasi dengan seluruh komponen bangsa terutama dengan partai-partai politik dan komponen startegis bangsa yang lain agar Presiden bisa merajut persaudaraan untuk mengajak mereka semua bersamasama membangun bangsa ini.

Menanggapi tantangan pembangunan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan, menurutnya,



hal itu merupakan janji yang ada di pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) untuk memajukan kesejahteraan umum.

menunjuk kementerian bidang ekonomi betul betul mempunyai jiwa nasionalisme, patriot agar sumber daya alam itu tidak dikelola untuk kepentingan pribadi atau kelompok .

sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya geopolitik untuk dikelola sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Achmad Basarah asal Dapil Jawa Timur V . (as/af) foto: iwan armanias/parle/hr.

Maka menurutnya, Presiden dalam “Presiden harus menggunakan

Ketua DPR Terima Dubes Polandia

Ketua DPR Setya Novanto, Kamis (23/10/14) menerima Duta Besar Republik Polandia Tadeusz Szumowski, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III. Terjadi perbincangan yang hangat diantara keduanya, dengan pembahasan utama mengenai hubungan bilateral kedua negara.

Setya sempat menyatakan, bahwa Republik Polandia merupakan mitra negara yang penting bagi Indonesia. Hal itu ditunjang pula hubungan kedua negara yang terjalin sudah cukup lama, dari tahun 1955. Ia juga berjanji akan meningkatkan hubungan kedua negara.

“Saya sangat mengapresiasi kunjungan Dubes Polandia ini, karena dengan adanya kunjungan kerja ini dapat terjalin kerjasama antara DPR dan Parlemen Polandia. Hubungan kerjasama kedua negara juga akan terus kami tingkatkan,” jelas Setya, saat ditemui usai pertemuan.

Politisi Golkar ini menambahkan, setidaknya ada 3 hal menarik yang menjadi perbincangan terkait program dalam waktu dekat. Yang pertama, mengenai program dialog lintas agama di Polandia, pada November nanti. Mengingat, Indonesia memiliki keragaman agama, serta budaya yang menjadi kekuatan Indonesia.

Berikutnya mengenai proyek *waste management* (pengelolaan limbah) di Jakarta, Palembang dan Banjarmasin. Selain itu, juga diadakan kerjasama mengenai *water treatment*, mengingat kedua hal ini membutuhkan perhatian dari negara. Hal ini ditunjang Polandia yang sangat mengerti



Ketua DPR RI Setya Novanto berjabat Tangan dengan Dubes Polandia

mengenai proyek ini, sehingga kerjasama ini bisa ditingkatkan.

“Program yang ketiga adalah pengajaran bahasa Indonesia di berbagai universitas di Polandia. Kita bersedia mengirimkan guru dan dosen ke Polandia mengajarkan Bahasa Indonesia. Dubes memberikan sambutan yang sangat luar biasa, sehingga kita akan tingkatkan program-program yang akan kita tindak lanjuti bersama,” tutup Setya.

Setya berharap, hubungan kedua negara dapat terjalin dengan harmonis, dan terus meningkatkan kerjasama. Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cinderamata dari kedua belah pihak dan foto bersama. (sf/af) foto: naefuroji/parle/hr

DPR Gelar Rapat Bamus Bahas Surat Presiden

DPR RI segera menggelar Rapat Pengganti Badan Musyawarah guna membahas surat dari Presiden Joko Widodo terkait perubahan nomenklatur kabinet pada pukul 14.00 Ini.

“Kita akan membahasnya dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan fraksi-fraksi di Ruang Pansus B pukul 14.00 WIB,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Kamis (23/10).

Dia mengatakan, Rapat Bamus tersebut akan memutuskan beberapa persoalan diantaranya mitra Kementerian akan berada di Komisi yang mana saja.



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

“Pembahasan nomenklatur seharusnya diserahkan ke komisi terkait, namun sampai saat ini masih belum terbentuk karena anggota belum

penuh,” tambahnya.

Menurutnya banyak usulan karena persoalan belum terbentuknya Komisi ini. “Ada yang mengusulkan tetap diserahkan karena komisi sudah dibentuk. Ada yang bilang nanti diserahkan ke komisi masing-masing, ada yang bilang di-take over sama kepemimpinan. Nanti kita lihat nanti perdebatan di Bamus,” terangnya.

Sampai berita ini diturunkan, Rapat Pengganti Badan Musyawarah belum berlangsung masih menunggu Pimpinan Fraksi dan Dewan. (si/nt)/foto: iwan armanias/parle/jw.

Warna-warni

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019





Pidato Jokowi Berikan Harapan Baru Bagi Rakyat



Patrice Rio Capella Anggota F-Nasdem DPR RI

Anggota DPR Patrice Rio Capella menilai Pidato Joko Widodo sangat bagus dan memberikan harapan baru bagi Rakyat Indonesia. “Melalui Pidato ini mengajak masyarakat

Indonesia untuk gotong royong bersama membangun bangsa dan negeri kita,” ujarnya kepada Wartawan di Gedung DPR, Senin, (20/10).

Menurutnya, kedepan dalam membangun bangsa perlu kerjasama dengan semua pihak. “Kita mengapresiasi kehadiran Prabowo, dan Hatta Radjasa itu sangat baik sekali kedepan, semoga walaupun banyak persoalan dapat kita selesaikan bersama,” tambahnya.

Terkait nama-nama Menteri yang muncul, Rio mengatakan, dirinya belum tahu bocoran nama-nama calon menteri tersebut. “Semua tergantung Presiden dalam memutuskan Menterinya, artinya Presiden tidak mau terjadi kejadian yang menimpa Menterinya nanti,” ujarnya.

Sebelumnya sempat beredar nama-nama menteri yang disetorkan Presiden Joko Widodo kepada KPK dan PPTK untuk direkam jejaknya. Namun masih belum bisa diverifikasi kebenaran nama-nama tersebut. “Nama yang dari Nasdem mungkin ada benarnya juga (Jadi Menteri),” gelak Rio kepada wartawan. (si) foto: dok/parle/hr.

Jokowi Hadapi Tantangan Besarnya Beban BBM Subsidi

Anggota DPR dari Fraksi PPP Achmad Farihal mengharapkan, kinerja pemerintahan Jokowi dapat lebih baik dibandingkan pemerintahan SBY. “Kita harus belajar dari kekurangan pemerintahan lalu,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senin, (20/10).

Menurutnya, Pemerintahan Jokowi akan menghadapi tantangan soal BBM subsidi yang telah mencapai Rp280 triliun yang semakin membebani keuangan negara. “Saya mengharapkan Jokowi dan kabinetnya bisa mengatasinya. Apabila dicabut BBM yang naik, tentunya akan besar,” ujar Achmad Farihal.

Menyinggung Pidato Presiden Joko Widodo, lanjut Farihal, pidato tersebut sederhana dan adanya keinginan dari Joko Widodo untuk bekerja keras. Terkait pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo, dirinya menilai pertemuan



Achmad Farihal Anggota F-PPP DPR RI

tersebut telah mencairkan kebekuan politik yang terjadi selama ini. “Selama ini orang menganggap besarnya persaingan yang tidak berkesudahan

sementara dengan pertemuan itu mencairkan suasana yang ada,” tambahnya. (si) foto: iwan armanias/parle/hr.

Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kenaikan BBM saat ini tidak tepat. Pasalnya, masih ada cara lain selain menaikkan BBM yaitu dengan melakukan penghematan dan konversi BBM yang gencar.

“Tantangan berikutnya yaitu kita harus mulai menerima kenyataan mencabut subsidi BBM itu kalau tidak ada konversi BBM memadai maka tidak akan berjalan,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin, (20/10).

Menurutnya, kalau hanya alasan butuh ruang fiskal buat APBN itu tidak beralasan yang diperlukan yaitu revolusi mental dengan melakukan penghematan di seluruh bidang. “Jangan pukul rakyat dengan menaikkan harga BBM dan jangan pukul rakyatnya duluan. Tapi mentalitas pejabatnya juga diubah,” tandasnya.

Dia menambahkan, jika ingin mencabut BBM atau subsidi sebaiknya pada APBN mendatang bukan APBN 2015 ini.

Pada kesempatan itu, Fahri mengatakan, dirinya mendorong legislatif agar lebih kuat dalam menjalankan fungsi kontrol pada eksekutif yang dipegang oleh pemerintahan



Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI

Jokowi-JK nanti. “Kita mendorong Koalisi Indonesia Hebat untuk memegang eksekutif agar lebih kuat, itu esensi demokrasi yaitu *check and balances*,” tambahnya. (si) foto: dok/parle/hr.

Kehadiran Prabowo Ciptakan Iklim Kondusif



Aria Bima Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI

Anggota DPR RI, Aria Bima mengapresiasi kehadiran Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto. Hal tersebut disampaikan Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan se usai Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Presiden RI, Joko Widodo, Senin (20/10) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta.

“Luar biasa, kita tidak hanya butuh Presiden, tidak hanya butuh Ketua DPR, MPR atau Ketua Partai. Ini bentuk kepemimpinan yang sangat luar biasa, saya mengapresiasi kehadiran Pak Prabowo yang tidak saya duga, karena itulah yang sebenarnya harus memberikan kesejukan, dan ada ke-sungguhan dari Pak Prabowo untuk bagaimana bersinergi dengan pemerintahan Jokowi - JK walaupun pada posisi di luar pemerintah,” ungkap Aria Bima.

Dilanjutkannya, apa yang dilakukan Prabowo ini menunjukkan sikap kenegarawanannya hingga kemudian dapat memberikan kesejukan iklim politik yang kondusif untuk melakukan fungsi masing-masing, baik di eksekutif maupun legislatif.

Sebuah sikap yang sangat rendah hati dikatakan Aria telah ditunjukkan Prabowo, ada ketulusan dan kesungguhan agar proses kenegaraan ini benar-benar berjalan secara lancar dengan dimulai iklim yang kondusif. Dengan begitu juga akan berpengaruh kepada DPR ke depan, dimana juga akan terjadi iklim kondusif dalam melakukan fungsi pengawasan. Sehingga eskektif pun dalam menjalankan tugasnya akan lebih baik dengan mengimplementasi bentuk konsultasi kita presidensial namun tetap ada *check and balance*. (Ayu) foto:iwan armanias/parle/hr.

Presiden Hendaknya Lebih Perhatian pada Pangan dan Pendidikan

Masalah-masalah yang sangat menyentuh kebutuhan hidup rakyat Indonesia seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan mestinya lebih mendapat perhatian utama, ketimbang masalah maritim yang selama ini banyak dikampanyekan Presiden Joko Widodo.

Demikian penegasan Anggota F-PAN DPR Eko Hendro Purnomo yang ditemui usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Senin (20/10). Menurut mantan anggota Komisi X DPR ini, Jokowi hendaknya tidak memfokuskan pada satu masalah saja.

“Kalau tadi beliau lebih berkonsentrasi di maritim, kita juga ingin pangan kita lebih baik lagi. Begitu juga pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lebih diprioritaskan. Buat saya Pak Jokowi dan JK konsen dengan masalah-ma-



Eko Hendro Purnomo Anggota F-PAN DPR RI

salah tersebut. Baru setelah itu, masalah maritim, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif. Jangan memfokuskan pada satu masalah saja,” katanya.

Eko juga segera menambahkan bah-

wa selama pemerintahan Jokowi-JK pro rakyat dan tidak diintervensi oleh asing, DPR pasti mendukung penuh. Ia juga bersyukur acara pelantikan berjalan baik di tengah isu-isu miring gangguan politik dan kemanan. Dia berharap, di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, negara menjadi lebih baik.

“Salama dia pro rakyat, berkepentingan untuk bangsa ini, dan tidak diintervensi oleh pihak asing, tentu 560 anggota DPR dibantu 130 teman-teman DPD juga akan mendukung beliau. Pelantikan hari ini yang diisukan diganggu, terbukti dengan kedewasaan politik semua pejabat dan pemangku kepentingan bersepakat menyukseskan Pelantikan Jokowi-JK. Terbukti tidak terjadi apa-apa,” katanya. (mh)

foto: naefuroji/parle/iw

Terima Kasih SBY dan Boediono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama satu decade terakhir. Di lima tahun terakhir masa jabatan, Presiden SBY didampingi Wakil Presiden Boediono. Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh kedua orang nomor satu di Indonesia ini.

Segep pihak pun tak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden SBY dan Wapres Boediono. Tak terkecuali segep Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan, saat acara pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wapres terpilih Jusuf Kalla.

“Atas nama pimpinan dan Anggota Majelis, kami menyampaikan penghargaan setinggi-setingginya kepada Presiden SBY dan Wapres Boediono, atas pengabdian, meletakkan landasan yang kokoh bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Semoga



Presiden Joko Widodo duduk berdampingan dengan mantan Presiden SBY

pengabdian beliau mendapatkan ridho Allah SWT,” kata Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan, sejumlah kemajuan telah dicapai, meskipun sejumlah

kekurangan harus terus diperbaiki. Ia menyatakan hal ini berkat kerja keras dan ikhtiar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa Indonesia.

“Kita patut bersyukur, di bawah kepemimpinan Presiden SBY selama satu dekade terakhir, kita mencatat bersama beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia. Indonesia kini telah naik menjadi *middle-income country* dari sebelumnya berada di posisi bawah di Asia,” jelas Zulkifli.

Dengan capaian pembangunan ekonomi yang cukup, tambah Politisi PAN ini, kini Indonesia menempati peringkat 16 besar dunia. Bahkan, menurut laporan Bank Dunia, Indonesia ditempatkan sebagai negara ke-10 dengan *Product Domestic Bruto* (PDB) terbesar dari 177 negara berdasarkan *Purchasing Power Parity* (PPP).

“Kita pun mencatat, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan *sustainable*. Didukung berjalan baiknya sejumlah kebijakan pengendalian inflasi dalam 5-8 tahun terakhir. Program percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, serta masifnya program pemberdayaan, dan Kredit Usaha Rakyat bagi UKM, sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan bergerakaknya dunia usaha Indonesia,” papar Zulkifli.

Mantan Menteri Kehutanan ini juga mengapresiasi langkah Presiden SBY yang berhasil meningkatkan APBN dan

pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Selain itu, apresiasi diberikan karena Presiden SBY telah membawa Indonesia berhasil menjadi Anggota G-20, yang berarti Indonesia sudah diakui sebagai kekuatan ekonomi global.

“Dengan berbagai modal dasar dan capaian ekonomi serta politik yang kita miliki, kita tentunya berharap dapat semakin meningkatkan sinergitas diantara berbagai komponen bangsa, sehingga dapat memberikan dukungan penuh kepada kinerja Presiden dan Wapres 2014-2019 dalam menerjemahkan visi dan misinya mengantarkan bangsa Indonesia menuju ke kejayaannya,” imbuh Zulkifli.

Dengan adanya tantangan yang semakin berat menuju kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia pada masa mendatang, berharap dapat diatasi dengan semakin memperkokoh pondasi kerjasama antara seluruh elemen bangsa, serta terus menggelorakan pembangunan bangsa Indonesia yang didasari atas Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Juga, semoga semangat pengabdian Presiden SBY dan Wapres Boediono akan terus menyala sepanjang hayat di kandung badan,” harap Zulkifli. (sf)/foto:iwan armanias/parle/hr.

Bidang Lain Diluar Maritim Juga Harus Dikembangkan

Setidaknya, ada tiga kali Presiden Joko Widodo menyinggung maritim dan laut dalam Pidato Perdananya usai Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Presiden, Senin (20/10) di gedung Parlemen. Hal tersebut menurut anggota DPR RI, Desy Ratnasari menjadi sebuah langkah yang positif bagi pemerintahan mendatang dalam menetapkan fokus atau konsentrasi program-programnya ke depan.

“Dalam Pidato Perdananya Pak Jokowi sebagai Presiden memang beberapa kali disinggung hal kemaritiman. Mungkin hal itu akan menjadi fokus atau konsentrasi beliau dalam lima tahun mendatang. Dan hal itu sah-sah saja dan positif. Karena sebagaimana diketahui *illegal fishing* sampai saat ini pun masih ada,” ungkap Desy.

Oleh karena itulah sempat beredar wacana dalam kabinet mendatang, Presiden Jokowi akan menciptakan Kementerian Kemaritiman. Meski demikian, Desy beranggapan tidak hanya maritim yang harus terus dieksplorasi atau dikembangkan. Karena menurutnya, bidang-bidang lain, seperti pertanian dan pertambangan pun tak kalah pentingnya untuk terus dilakukan pengembangan.

“Tentu tidak hanya maritim saja yang harus terus dieksplorasi, bidang-bidang lain pun seperti pertanian dan pertambangan harus terus dikembangkan untuk mensejahterakan rakyat. Bagaimana dengan implementasinya? Ya kita lihat saja kedepan, yang pasti setelah komisi-komisi di DPR



Desy Ratnasari Anggota F-PAN DPR RI

terbentuk dan kita konsen pada bidang masing-masing, tentu kita akan siap untuk menjalankan fungsi pengawasan pada program-program Jokowi ke depan,” paparnya. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

Kekuatan Jokowi pada Komunikasi Interpersonal

Walau mungkin komunikasi publiknya kurang bagus, tapi Presiden Joko Widodo memiliki kekuatan komunikasi interpersonal yang sangat baik. Ini ditandai dengan mencairnya hubungan politik dengan para “rival” politiknya, sehingga terasa bersahabat dan damai.

Anggota F-PDI Perjuangan Jalaluddin Rakhmat menyatakan hal tersebut usai mengikuti acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Senin (20/10). Yang paling menarik dari sosok Jokowi adalah kemampuannya melakukan diplomasi yang halus kepada para elit politik, termasuk kepada Prabowo Subiyanto yang menjadi rival politiknya selama pilpres berlangsung.

“Kekuatan Jokowi adalah pada komunikasi interpersonal. Mungkin di hadapan publik tidak begitu bagus, tapi dalam hubungan interpersonal



Jalaluddin Rakhmat Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI

dia sangat piawai. Buktinya, semuanya cair. Apa yang kita duga bakal terjadi macam-macam akhirnya beres dengan sendirinya,” nilai Jalaluddin yang akrab

disapa Kang Jalal itu.

Pakar komunikasi yang kini menjadi politisi tersebut, berkomentar, pidato Jokowi ingin kembali menegaskan Indonesia sebagai negara maritim. Semua elemen bangsa diserukan untuk bersatu membangun bangsa dengan kerja keras. “Saya kira yang diperlukan di negeri ini, kan, bersatu, bekerja keras, dan mensejahterakan rakyat dengan membangun kekuatan sendiri.”

Ditanya soal optimismenya, Kang Jalal menyatakan optimis pemerintahan Jokowi-JK akan sukses selama 5 tahun mendatang. Walau jabatan Pimpinan Parlemen dikuasai lawan politik, tapi setidaknya dengan dilantikannya Joko Widodo sebagai Presiden, ada yang bisa disukseskan oleh PDI Perjuangan selama kepemimpinan politik 5 tahun ke depan. (mh) foto: naefuroji/parle/iw

Transisi Kepemimpinan Terbaik

Anggota DPR RI, Ruhut Sitompul mengacungi jempol atas sikap kenegarawanan yang ditunjukkan SBY. Presiden ke-enam Indonesia itu dinilai Ruhut berhasil menciptakan transisi pemerintahan yang sangat baik, bahkan bisa dikatakan yang terbaik hingga saat ini.

Hal tersebut diungkapkan Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini usai acara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Presiden Joko Widodo, Senin (20/10).

“Ini transisi terbaik. Kenegarawanan SBY perlu diacungi jempol. Sejarah



Ruhut Sitompul Anggota F-PD DPR RI

baru karena sebelumnya tidak ada

transisi yang mulus sejak zaman Soekarno,” ungkap Ruhut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden terpilih hadir dalam prosesi Pelantikan, bahkan di Istana pun dikatakan Ruhut, SBY akan menggelar prosesi upacara militer.

Ruhut menjelaskan, apa yang dilakukan SBY adalah upaya untuk membangun budaya ketimuran di masa peralihan kepemimpinan. Sehingga ia berharap Jokowi dapat melanjutkan tradisi yang diinisiasi oleh SBY ini. (Ayu) foto:iwan armanias/parle/hr.

Tantowi Harapkan Jokowi Segera Umumkan Kabinetnya

Politisi Golkar Tantowi Yahya berharap Presiden Joko Widodo segera mengumumkan anggota kabinetnya. Kalau bisa besok diumumkan dan itu

baik sekali, karena terkait dengan penyusunan keanggotaan komisi-komisi di DPR serta alat kelengkapan Dewan (AKD).

Hal itu dikatakan anggota Dewan dari FPG di Gedung DPR Senin (20/10) se usai menghadiri pelantikan Presiden Jokowi. Menurut Tantowi, selama

belum ada pengumuman kabinet dari pemerintahan yang baru, DPR belum bisa menyusun Komisi-Komisi dan alat kelengkapannya.

Kepada Presiden Jokowi, ia mengharapkan agar semua janjinya baik yang terucap selama kampanye dan yang diucapkan ketika debat Capres dan Cawapres dapat satu demi satu direalisasikan sesuai dengan kemampuan APBN. “Baik kami di parlemen maupun masyarakat, sangat menunggu janji-janji Pak Jokowi dan segera diwujudkan,” ujarnya.

Terkait dengan kehadiran Prabowo dalam rangka pelantikan Presiden tersebut, Tantowi menilai hal itu merupakan suatu penghormatan yang sangat luar biasa, karena selama ini yang



Tantowi Yahya, anggota F-PG DPR-RI

pandangan yang muncul di masyarakat adalah Koalisi Merah Putih akan mem-

boikot pelantikan Presiden namun pada kenyataannya adalah tidak benar. Selama ini masyarakat sudah menilai negatif, namun kenyataannya KMP mendukung sepenuhnya.

Tantowi Yahya juga menyinggung keberadaan KMP bahwa esensi dari politik itu adalah komunikasi, bagaimana membangun sebuah kemitraan dan kesepakatan atas nama kolektif dan kolegial. “Kalau pintu komunikasi tertutup, maka perkawanan itu tetap harus didorong. Kendati demikian, sikap politik kita tidak pernah berubah bahwa KMP tetap akan menjadi penyeimbang dalam kendali pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Tantowi menambahkan. (spy)/ foto:andri/parle/hr.

Pidato Jokowi Belum Sentuh Persoalan Bangsa



Al-Muzammil Yusuf Anggota F-PKS DPR-RI

Pidato Perdana Presiden Jokowi pada saat dilantik dalam Sidang Paripurna MPR dinilai belum menyentuh persoalan bangsa secara integral. Perhatian lebih pada masalah maritim diharapkan tidak melupakan sejumlah isu penting yang perlu diselesaikan pemerintahan ke depan.

“Kelihatan masalah laut, maritim perhatian khusus beliau, terkesan pidato itu tidak membahas persoalan kenegaraan

secara integral. Mudah-mudahan ini semata sebagai pembuka dan keterbatasan waktu yang kurang panjang, kita harap kekurangan dalam pidato bisa ditutup dengan aksi nyata di lapangan,” kata anggota DPR RI Al Muzammil Yusuf di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/14).

Pada bagian lain wakil rakyat dari dapil Lampung ini sepakat aspek kelautan belum digali bangsa ini secara optimal. Ia meyakini potensi ini bisa menjadi pintu untuk menyejahterakan bangsa Indonesia ke depan.

“Ingat panjang garis pantai Indonesia adalah keempat dunia, lebih dari 90 ribu kilo meter. Kita memiliki luas laut 5,8 juta km² dan lebih dari 17 ribu pulau. Ini adalah aset sumber daya alam Indonesia yang perlu diberdayakan dan dikelola oleh Pemerintahan Jokowi kedepan,” ujar dia.

Konsekuensinya, terang Muzammil, ke depan perlu ada kebijakan yang masif dalam modernisasi industri strategis dibidang perkapalan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

“Selama ini kita banyak membeli kapal dari luar negeri. Kedepan kita harus memberikan perhatian khusus kepada industri perkapalan dalam negeri sehingga kita dapat memproduksi kapal yang berkualitas dan membelinya untuk keperluan dalam negeri,” tandas Politisi FPKS ini.

Ke depan menurutnya para nelayan, lulusan sarjana perkapalan, kelautan, dan pertanian perlu diberikan posisi khusus untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi. Disisi lain, TNI dan Polri harus memperkuat keamanan laut agar bebas dari eksploitasi negara lain. (iky) foto: odjie/parle/hr.

Semoga Jokowi Tak Kecewakan Rakyat

Terpilih sebagai Presiden dengan meraih 53% suara rakyat dalam pilpres 2014, Jokowi diharapkan tidak kecewakan rakyat yang telah memilihnya. Pidato perdana Jokowi di MPR usai dilantik yang menyerukan kerja keras, sangat baik untuk segera diimplementasikan.

Anggota F-Gerindra DPR Rachel Maryam menyatakan hal tersebut sesuai mengikuti acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Senin (20/10). “Saya berharap Pak Jokowi dan JK yang dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia tidak mengecewakan rakyat yang telah memilihnya,” katanya.

Pidato Jokowi di hadapan Rapat Paripurna MPR, lanjut mantan Anggota Komisi VI DPR itu, dinilai sangat



Rachel Maryam, Anggota F-Partai Gerindra DPR-RI

baik. Bahkan, substansi pidatonya bisa segera diimplementasikan kepada rakyatnya. “Saya berharap mudah-mudahan apa yang menjadi isi pidato dari Pak Jokowi bukan hanya pidato hari ini saja, tapi benar-benar bisa diimplementasikan pada masa jabatannya 5 tahun mendatang,” harapnya.

Rachel juga menyatakan, selama kebijakan pemerintahan baru tidak bertentangan dengan Pancasila, konstitusi, dan NKRI, semua patut mendukungnya. Dan fraksinya sambung Rachel, akan mengoreksi bila ada kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Gerindra dan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tetap akan menjadi oposisi yang konstruktif di parlemen. (mh) foto: naefuroji/parle/iw

DPR Apresiasi Presiden Kembali Indonesia Negara Maritim



Daryatmo Mardiyanto Anggota F-PDI Perjuangan DPR-RI

Anggota DPR Daryatmo Mardiyanto mengapresiasi pernyataan Presiden yang akan mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. “Itu memang menjadi visi pemerintah ke depan sebab 2/3 wilayah kita terdiri dari lautan.

Wilayah laut bukan pemisah, tetapi menjadi penghubung wilayah satu dengan lain, sekaligus bisa meningkatkan pembangunan di wilayah pesisir,” katanya menanggapi Pidato perdana Presiden Jokowi Widodo di Gedung DPR/MPR, Senin (20/10).

Dalam salah satu bagian pidatonya Presiden yang akrab dipanggil Jokowi ini menekankan, kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. “Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, laut dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semanya sehingga Jalesveva Jayamahe - di laut kita jaya- sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kita kembalikan,” tegas Presiden.

Menurut Daryatmo, sumber daya di laut kita sangat besar dan tidak terbatas, maka tekad pemerintah itu bisa diarahkan untuk meningkatkan

pembangunan sektor kelautan sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sudah saatnya masyarakat yang di wilayah pesisir dan rakyat yang menekuni bidang kelautan tidak terpinggirkan, sebaliknya menjadi su-byek dari pembangunan,” katanya.

Di sisi lain, kata politisi PDI Perjuangan ini, masyarakat di pinggir atau sekitar wilayah laut telah menjadi pejuang dan perekat wilayah perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Selain itu masyarakat nelayan bisa setara dengan yang lain.

Lebih lanjut Daryatmo mengatakan, selama ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selalu berorientasi pada daratan atau kontinental. Padahal, kata Daryatmo, Negara kita bukan kontinental, tetapi negara kepulauan sehingga potensi kelautannya yang besar memerlukan perhatian yang besar pula.

Saat ditanyakan, adanya rencana

Pemerintahan Jokowi membentuk Kementerian Kemaritiman, itu menunjukkan perhatian yang besar pada masalah kemaritiman. Kemaritiman

tidak boleh ditinggalkan, bahkan harus menjadi fokus dan bisa setara dengan yang lain. "Potensinya sangat besar dan sudah saatnya menangani kemaritiman

lebih komprehensif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Daryatmo menambahkan. (mp)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

PPP Harapkan Pimpinan AKD Dipilih Secara Proporsional

Peta politik ternyata cepat sekali berubah. Dalam hitungan hari, peta koalisi di DPR telah berubah, semula Fraksi PPP yang bergabung ke Koalisi Merah Putih (KMP), kini telah berubah haluan ke kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Anggota DPR dari FPP Romahurmuziy ditemui pers usai menghadiri Sidang Paripurna MPR Senin (20/10) siang mengatakan, anggota DPR itu kepanjangan dari fraksi sehingga ada harus perundingan dulu di level fraksi untuk mengajukan paket pimpinan di tingkat komisi.

Sementara belum ada perundingan di fraksi-fraksi tentu akan sulit membayangkan menjadi pemilihan paket pimpinan di komisi-komisi atau alat kelengkapan Dewan (AKD) yang lain. Menurut politisi PPP yang akrab dipanggil Romi ini, jangan lupa pemilihan pimpinan di level komisi dan AKD sesuai tatib DPR pasal 251 mengharuskan adanya kuorum fraksi. Karena itu kalau PPP masuk ke KIH dan Demokrat tetap di KMP dan tidak akan duduk bersama atau berunding maka dipastikan tidak akan tercipta satu paket. Karena jumlah fraksi koalisinya sama maka tidak ada yang menca-pai korum yakni masing-masing 5.

"Dengan posisi itu mengharuskan KMP dan KIH duduk berunding. Dan bagi Fraksi PPP di level pimpinan tidak ada lagi KIH dan KMP, yang ada adalah fraksi-fraksi hasil pemilu 9 April 2014," tandas Romi lagi.

Berdasarkan catatan, KMP terdiri Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PPP dan Fraksi PD pada saat pemilihan Pimpinan DPR yang lalu.



Romahurmuziy Anggota F-PPP DPR-RI

Sementara KIH terdiri 4 fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Hanura. Dengan kondisi yang sekarang dengan posisi 5:5 maka korum tidak akan terpenuhi sebab pasal 251 tatib DPR mengharuskan adanya korum fraksi yakni 6

Mengenai sikap PPP yang akhirnya beralih ke kubu KIH, Romi mengatakan ingin membawa kesejukan dalam politik nasional. "Karena itu dia meminta seluruh fraksi untuk duduk bersama menyelesaikan pimpinan AKD ini dan membaginya secara proporsional. Tentunya ini yang kita harapkan," tutup Romi. (mp) foto: naefuroji/parle/iw

Dewan Ajak Media Bangun Parlemen Modern

Peran dan fungsi media massa mempunyai sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Sejalan dengan tuntutan dan buah dari reformasi, media massa pun kini mendapatkan kebebasan untuk dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, terutama menjadi alat kontrol sosial, bahkan menjadi bagian dari proses penguatan demokrasi.

"Dalam kesempatan ini, kami ingin mengajak Ibu/Bapak untuk ikut berpartisipasi dalam melanjutkan proses penguatan demokrasi membangun parlemen modern yang telah dirintis oleh DPR periode 2009-2014," kata Ketua DPR, Setya Novanto dalam sambutannya pada acara makan malam/silaturahmi Pimpinan DPR bersama Pemimpin Redaksi Media

Massa, di Pustakaloka Gedung DPR RI, Jumat malam (17/9).

Menurut Setya Novanto, parlemen modern memiliki tiga indikator, pertama, parlemen yang mudah diakses oleh publik; kedua, parlemen yang berbasis informasi dan teknologi; dan ketiga, parlemen yang berperan dan berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Untuk membangun parlemen modern tersebut, kata Setya Novanto, DPR membutuhkan dukungan dari media.

"DPR dan Media memiliki kepentingan bersama dalam proses penguatan demokrasi, meskipun masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda," tegasnya.



Ketua DPR Setya Novanto

Dalam acara yang dihadiri Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Redaksi Media Massa dan Dewan Pers, Setya Novanto menjelaskan bahwa salah satu fungsi DPR adalah menyusun legislasi yang mencerminkan aspirasi dan memenuhi ekspektasi publik.

Namun disisi lain, media berperan sebagai sarana komu-

nikasi antara DPR dan masyarakat, media memberitakan kegiatan-kegiatan, keputusan-keputusan yang diambil, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, serta *political statement* dari masing-masing Anggota DPR. Hal ini sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa.

“Ini artinya, DPR dan media massa dapat membangun dan menciptakan hubungan yang konstruktif untuk penguatan demokrasi,” imbuhnya.

Hubungan yang baik ini, harapnya, menjadi kekuatan positif dalam memberikan pemahaman tentang DPR. Selain itu media memperoleh ruang untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.

Selanjutnya, politisi Partai Golkar ini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemimpin redaksi media massa yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara tersebut. “Media massa bagi kami adalah kekuatan demokrasi yang nyata,” tandasnya.

Acara makan malam atau silaturahmi Pimpinan DPR bersama pemimpin redaksi media massa bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang konstruktif antara DPR dengan media massa yang selama ini telah terjalin dengan baik. (sc) *foto:ry/parle/hr.*

Pertemuan Prabowo-Jokowi Ubah Lanskap Politik

Kalangan politisi di DPR menyambut baik pertemuan dua tokoh yang telah bersaing ketat dalam Pemilu Presiden 2014, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pertemuan ini diyakini akan mengubah lanskap politik dan menghadirkan kesejukan ditengah masyarakat.

“Pertemuan Pak Prabowo dan Jokowi telah mengubah lanskap politik kita. Saya lihat suasana pertemuan kita malam ini juga jauh lebih mesra, indeks harga saham juga mencuat naik. Mudah-mudah kondisi ini membuat bangsa kita menjadi lebih baik,” kata anggota DPR RI Tantowi Yahya saat bicara dalam acara silaturahmi dengan Pimpinan Redaksi sejumlah Media Massa di Pustakaloka, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/10/14).

Bagi politisi FPG ini, Indonesia saat ini memasuki babak paling berat dari perjalanan demokrasi. Apabila berhasil maka bisa dikatakan bangsa ini berhasil melewati babak - babak penting demokrasi secara cepat. “Jauh lebih cepat dari ‘mbahnya’ demokrasi Amerika yang setelah ratusan tahun masih membuat kesalahan yang elementer,” tandasnya.

Bicara pada kesempatan yang sama Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut langkah Prabowo tersebut sebagai pilihan seorang negarawan yang mementingkan masalah bangsa daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Ia meyakinkan ketegangan berkepanjangan seperti yang di-



Tantowi Yahya, Anggota FPG DPR-RI

alami Mega-SBY tidak akan terjadi kepada Prabowo.

“Saya kira Pak Prabowo bukan tipe pendendam, marah, berjiwa kerdil. Beliau berjiwa besar. Dengan pertemuan itu terjawab sudah ketegangan seperti Mega-SBY periode lalu sudah pasti tidak akan terjadi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini. (iky)/*foto:naefurodji/parle/iw.*



Pemerintahan Joko Widodo Masih Hadapi Krisis Ekonomi Global



Tifatul Sembiring Anggota FPKS DPR-RI

Pemerintahan Joko Widodo masih akan menghadapi ancaman krisis ekonomi global yang masih melanda berbagai negara di Eropa dan AS.

“Tantangan masih sama Eropa dan AS masih resesi ekonomi artinya bagaimana pemerintahan Joko Widodo dapat mengukuhkan ekonomi itu diangka 6 persen dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil,” ujar Anggota DPR dari PKS Tifatul Sembiring kepada wartawan di Gedung DPR, Senin, (20/10).

Menyoal Pidato Presiden Joko Widodo,

dia mengatakan, pidato itu sangat singkat dan sederhana. “Kita sudah dengarkan pidato Presiden Joko Widodo, dalam tanda kutip *stakeholder* pasar dan ekonomi kita masih menunggu program apa prioritas Jokowi dan ini semua akan menjadi suatu pegangan,” ujarnya.

Dia menambahkan, mudah-mudahan Presiden Joko Widodo dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. “Kita juga mengharapkan dengan dibentuknya Kabinet ada langkah prioritas dari Jokowi,” tandasnya. (si)foto: *naefuroji/parle/iw*

DPR Siap Bahas RUU Kemaritiman

DPR RI menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo memberikan perhatian pada pembangunan laut dan kemaritiman. Untuk mendukung keberhasilan langkah itu pemerintah perlu menyiapkan seperangkat regulasi sebagai payung hukum setiap kebijakan.

“Kita dukunglah kembali ke laut, semoga ini bisa jadi momentum bagi bangsa karena kita pernah jaya di laut. DPR mendukung dari sisi regulasi misalnya RUU Kemaritiman,” kata anggota DPR Deding Ishak usai Paripurna Pelantikan Presiden di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/14).

UU Kemaritiman itu menurutnya



Deding Ishak Anggota FPG DPR-RI

penting untuk mengakomodir sejumlah aturan perundang-undangan terkait permasalahan kelautan. Tujuan utama adalah agar koordinasi antar

lembaga dan institusi terkait bisa lebih baik.

Ia menambahkan untuk memuluskan rencana tersebut pemerintah perlu membahasnya bersama DPR sehingga regulasi dan anggaran yang diperlukan dapat disesuaikan. Politisi Fraksi Partai Golkar ini meyakini ruang soal pembangunan kemaritiman ini belum jadi prioritas dalam APBN 2015.

“Polri kita dorong melakukan penyesuaian memperkuat Polairudnya, termasuk TNI AL kita. Jadi perlu manuver, melakukan penyesuaian terhadap prioritas yang sudah ada selama ini,” tegas Deding yang sebelumnya bertugas di Komisi III. (iky) foto: *ivan armanias/parle/hr*

Pimpinan DPR Tunjuk Nurul Arifin Sebagai Juru Bicara

Pimpinan DPR RI menunjuk mantan anggota Komisi II Nurul Arifin sebagai juru bicara untuk mendukung komunikasi dengan media. Langkah ini merupakan konvensi diantara pimpinan dengan harapan informasi seputar pimpinan bisa lebih efektif disampaikan kepada masyarakat.

“Ini konvensi saja karena kita butuh semacam juru bicara, tidak mungkin semua di *handle* oleh pimpinan. Mbak Nurul sudah lama di DPR jadi mengerti apa itu tugas - tugas DPR, punya relasi yang baik dengan media, komunikasinya baik, jadi saya kira tepatlah,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai mengi-

kuti silaturahmi dengan Pemred Media di Pustaka Loka, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (17/10/14).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan media tidak bisa dipisahkan dalam praktek demokrasi. Penunjukan Nurul menurutnya membuat

informasi pimpinan semakin mudah diakses pada akhirnya dapat berpengaruh positif pada citra dewan.

Bicara pada kesempatan yang sama Nurul Arifin menyatakan kesiapannya mengemban tugas tersebut. Ia menyebut sejumlah pembicaraan saat ini masih dilakukan untuk melakukan penyempurnaan.

“Ini masih baru banget, jadi lembaga mungkin humas tapi orangnya juru bicara. Di DPR ini media yang meliput banyak sementara pimpinannya hanya lima orang, jadi tugas saya lebih pada unsur pimpinan kalau publik dengan DPR secara global ada kesetjanaan,” tuturnya.

Keputusan penunjukan Nurul diungkapkan pertama kali oleh Tantowi Yahya moderator acara Silaturahmi dengan Pemimpin Redaksi Media. “Akan ada seorang petugas khusus hu-



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Tantowi Yahya dan Nurul Arifin

mas, PR yang kita percayakan kepada sahabat kita Hj. Nurul Arifin. Jadi mulai sekarang silahkan hubungi beliau untuk

mengurangi beban Pak Setya Novanto, Pak Fadli, Pak Agus, Pak Fahri dan Pak Taufik,” kata dia. (iky) foto: odjie/parle/hr

DPR Terbuka Bagi Media



Ketua DPR Setya Novanto pada acara pertemuan dengan Pemred Media Nasional

DPR secara kelembagaan sangat terbuka bagi media massa untuk dapat meliput berbagai aktivitas dan kegiatan yang terjadi di Gedung DPR.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR, Setya Novanto dalam sambutannya pada acara makan malam/silaturahmi Pimpinan DPR bersama Pemimpin Redaksi (Pemred) Media

Massa di Pustakaloka Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat malam (17/9).

“DPR melalui Sekretariat Jenderal DPR berusaha menyediakan fasilitas yang dibutuhkan teman-teman wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya,” ungkapnya.

Menurutnya, di lingkungan DPR ini terkenal bahwa wartawan DPR paling bisa “suka-suka”.

“Berpakaian bebas, dikasih seragam tidak mau dipakai, pakai sandal, duduk dimanajaja, merokok dimana saja, dan lain-lain, sehingga memang wartawan DPR terbuka atas informasi yang ada pada lembaga ini,” paparnya. Setya Novanto mengajak seluruh hadirin yang hadir pada acara tersebut, untuk membandingkan wartawan yang bertugas di kantor lain. Disana, menurut politisi Partai Golkar ini, aturan banyak, informasi tertutup dan sebagaimana halnya birokrasi, wartawan tidak terlalu bisa akrab sehingga berita juga sedikit, padahal kritik media harusnya lebih banyak dilakukan ke sana karena mereka merupakan pelaksana.

“Pada kesempatan yang berharga

ini, perlu juga saya sampaikan bahwa agar rapat-rapat berjalan dengan lancar dan teman-teman media dapat melakukan tugas peliputan dengan baik, DPR pada periode lalu telah menyusun Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peliputan Pers di DPR,” terangnya.

Peraturan ini disusun dengan mengikutsertakan *stakeholder* media massa seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PWI, AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan AJTI (Asosiasi Jurnalis TV Indonesia).

“Untuk itu, kami atas nama lembaga DPR mengucapkan terima kasih atas peran aktif dari seluruh *stakeholder* media, sehingga peraturan itu bisa diwujudkan,” katanya.

Mengingat tantangan dan tugas berat yang harus diemban, baik oleh DPR maupun media massa, Setya Novanto dengan senang hati membuka ruang yang seluas-luasnya kepada teman-teman Pemred untuk dapat melakukan komunikasi, agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. (sc)/foto:naefurodji/parle/iw.

Negara Kuat Jika Semua Lembaga Negara Panggul Mandat Konstitusi

Presiden Joko Widodo menegaskan, kini saatnya kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berkemajuan di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Demikian pidato perdana Presiden Jokowi se usai pengucapan sumpah di hadapan Sidang Paripurna MPR yang dipimpin Ketuaannya Zulkifli Hasan, Senin (20/10). Sidang berlangsung khidmat dan semarak, dihadiri para mantan Presiden, Wapres, para pemimpin negara sahabat, diantaranya PM Singapura, PM Malaysia, Sultan Brunei, Presiden Timor Leste, PM Australia, Menlu AS John Kerry dan Utusan PM Jepang dan perwakilan negara sahabat.

Tak kalah mendapat sambutan dan *applause* panjang adalah kehadiran Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang merupakan kompetitornya dalam pemilu Presiden beberapa waktu lalu.

Sidang Paripurna MPR yang beragendakan pelantikan Presiden RI ke-7 dan Wakil Presiden ke 12 dimulai pukul 10.00 diawali Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pidato Ketua MPR, pengucapan sumpah Presiden dan Wapres, dilanjutkan dengan pidato Presiden diakhiri dengan doa oleh Menag. Lukman Hakim Saifuddin.

Lebih lanjut Presiden menyatakan keyakinannya, tugas sejarah yang berat itu akan bisa dipikul bersama dengan persatuan, gotong royong dan kerja keras. "Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan, kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras," ujarnya.

Pemerintahan yang ia pimpin, lanjut Jokowi, akan bekerja untuk memas-



Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Perdana se usai Pengucapan Sumpah di Sidang Paripurna MPR

tiken setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Dia juga mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

"Saya yakin, negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh Konstitusi," ungkapnya. Kepada para nelayan, buruh, petani, pedagang bakso, pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, POLRI, pengusaha dan kalangan profesional, Presiden menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong royong. Inilah, momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk bekerja...bekerja... dan bekerja," tegas Presiden.

Di bagian lain, Presiden menekankan kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.

"Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana," tegas Presiden lagi.

Mengakhiri pidatonya, Presiden mengajak kita sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hampasan ombak yang menggulung.

"Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi," demikian Presiden Joko Widodo. (mp)/
foto:iwanarmanias/parle/iw.



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Fadli Zon menerima Duta Besar Korea Selatan Mr. Taiyoung di Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (22/10). Foto: Andri/Parle/Hr.



Rapat Paripurna Pengesahan Nama-nama Anggota Fraksi di AKD dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Rabu (22/10). Foto: Andri/Parle/Hr.



Rapat Paripurna Lanjutan Pengesahan Nama-nama Anggota Fraksi di AKD dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Kamis (23/10). Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr.